

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama ini, peristiwa mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat dikenal dengan peranan dari Divisi Siliwangi yang mana merupakan satuan milik Tentara Nasional Indonesia atau dengan bantuan dari rakyat Jawa Barat. Namun, masih ada andil dari pihak lain yang belum begitu dikenal. Hal tersebut dapat dilihat, salah satunya dalam buku teks pelajaran sejarah, contohnya adalah buku teks pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya, dalam bab “Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa”. Dalam bab tersebut, penjelasan mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang berupa konflik dan pergolakan dalam negeri di Indonesia, salah satunya DI/TII Jawa Barat, hanya dituliskan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, andil dari pihak lainnya seolah tidak ada, karena tidak dituliskan.

Meski telah memproklamasikan kemerdekaannya, perjalanan Indonesia sebagai negara baru tetap diwarnai oleh berbagai permasalahan, terutama pada dekade 1950-an atau yang dalam periodisasi sejarah Indonesia lazim disebut sebagai periode Demokrasi Liberal. Permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada dekade 1950-an tersebut utamanya adalah berupa berbagai rongrongan yang justru berasal dari dalam negeri sendiri. A. H. Nasution mengemukakan bahwa Indonesia pada masa itu mengalami permasalahan-permasalahan, seperti keadaan politik dengan sistem mencontoh Barat yang tidak stabil; keadaan sosial-ekonomi yang memburuk; keadaan keamanan yang juga semakin memburuk; persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak ada kemajuan; serta adanya pergolakan intern tentara dan intern partai-partai politik (Nasution, 2013, hlm. 13).

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada dekade 1950-an adalah kondisi keamanan yang semakin memburuk. Hal tersebut disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI menyebut gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada dekade 1950-an tersebut sebagai pemberontakan-pemberontakan. Buku tersebut mengklasifikasikannya sebagai berikut: Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Andi Aziz, Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal sebagai DI/TII (di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan), dan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) PRRI/ Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010, hlm. 345-378).

Jika ditinjau dari tahun terjadinya, gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut terjadi dalam waktu yang saling berdekatan, bahkan hampir bersamaan. Pada awal dekade 1950-an ketika Republik Indonesia Serikat masih berdiri, masalah APRA; masalah Andi Aziz; dan masalah RMS terjadi, bahkan masalah RMS masih terus berlanjut hingga masa Republik Indonesia. Selain itu, masalah DI/TII di Jawa Barat yang sebenarnya telah terjadi sejak 1949 pun masih belum mereda, bahkan telah menyebar ke beberapa wilayah lainnya, seperti di Sulawesi Selatan dan di Aceh. Ketika masalah DI/TII tersebut belum berhasil diatasi, permasalahan baru sudah terjadi lagi, yakni dengan dideklarasikannya Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi pada 1957 dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera pada 1958. Keduanya kemudian dikenal dengan nama PRRI/Permesta.

Untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut, maka dilakukanlah usaha-usaha, salah satunya dengan melakukan operasi militer. Tentara Nasional Indonesia (dulu dikenal juga dengan sebutan Angkatan Perang Republik Indonesia) bertugas untuk melaksanakan operasi militer tersebut. Untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat itu sendiri, khususnya dilakukan oleh Divisi Siliwangi sebagai pasukan dari Tentara Nasional Indonesia yang berlokasi di Jawa

Barat. Sebuah pendapat menyatakan bahwasannya karena Indonesia yang merupakan negara baru pada waktu itu terus-menerus menghadapi apa yang oleh pendapat ini disebut sebagai penentang-penentang yang militan/pemberontak bersenjata, sedangkan kepolisian tidak mampu menangani persoalan tersebut, maka tentara harus memasukan urusan memelihara keamanan dalam negeri ke dalam tugas mereka yang regular (Sundhaussen, 1986, hlm. 89).

Selain mengalami masalah keamanan yang disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, Indonesia juga harus mengalami permasalahan lain, yakni masalah yang berasal dari tentaranya itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana pendapat A. H. Nasution dalam kutipan sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang juga dialami oleh Indonesia pada dekade 1950-an adalah adanya pergolakan dalam tentara. Dalam situs web milik Tentara Nasional Indonesia dikemukakan bahwasannya situasi politik Indonesia pada dekade 1950-an telah memengaruhi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Pada waktu itu, terjadi perselisihan antara parlemen dengan tentara, yang ditandai oleh terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri (TNI, t. t.).

Berdasarkan pernyataan di atas tersebut, muncul pertanyaan, yakni apakah keadaan Tentara Nasional Indonesia yang sedang mengalami permasalahan, khususnya perpecahan di internalnya sendiri tersebut berpengaruh terhadap berbagai kegiatannya, termasuk dalam kegiatannya mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang sedang banyak terjadi di Indonesia pada waktu itu. Apalagi pada saat itu, tentara bukan hanya dihadapkan pada satu masalah gangguan keamanan dalam negeri saja. Melainkan, dihadapkan pada banyak masalah gangguan keamanan dalam negeri, bahkan tak jarang lebih dari satu gangguan keamanan dalam negeri harus dihadapi dalam waktu yang berdekatan atau bahkan bersamaan sehingga konsentrasi dan kekuatan tentara terpecah. Padahal tentara seharusnya menjadi pihak yang paling diandalkan untuk mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri tersebut.

Meski Tentara Nasional Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak ideal karena permasalahan yang tengah dialaminya, tetapi tentara tetap memiliki peranan utama dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut. Oleh karena itu, persoalan mengenai penyelesaian terhadap masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut selama ini identik dengan peranan dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana halnya persoalan mengenai penyelesaian terhadap masalah DI/TII Jawa Barat yang identik dengan peranan Divisi Siliwangi.

Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut memang tidak dapat dipungkiri, karena hal tersebut memang merupakan tugas tentara pada masa itu sehingga tentara tentu memiliki andil besar di dalamnya. Begitu juga dengan peranan Divisi Siliwangi dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Namun, dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut terdapat juga andil dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, andil dari pihak-pihak lain, selain tentara, dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut, salah satunya dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat menarik untuk diketahui lebih lanjut.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka muncul pertanyaan, yakni apa yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (dulu bernama Djawatan Kepolisian Negara) ketika negara sedang dihadapkan kepada masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang banyak terjadi pada dekade 1950-an dan apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia juga turut memiliki andil dalam mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut, termasuk dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat sebagai salah satu gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Hal tersebut karena pada masa itu, selain telah memiliki Tentara Nasional Indonesia, Indonesia juga telah memiliki Kepolisian

Negara Republik. Lebih-lebih Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki Korps Mobile Brigade. Korps Mobile Brigade (sekarang lebih dikenal sebagai Korps Brigade Mobil/Brimob) itu sendiri merupakan satuan elite milik kepolisian yang bersifat paramiliter sehingga berbeda dengan satuan polisi biasa.

Kemudian berdasarkan pencarian informasi awal terhadap buku-buku mengenai sejarah kepolisian di Indonesia, ditemukan informasi awal yang menyatakan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korps Mobile Brigade juga turut memberikan andil dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (1996, hlm. 69) menyatakan bahwa selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, kepolisian negara, khususnya Korps Mobile Brigade turut dalam usaha apa yang disebut oleh buku ini sebagai penumpasan terhadap pemberontakan di dalam negeri, salah satunya seperti dalam penumpasan terhadap DI/TII Jawa Barat. Bahkan, salah satu pendapat, yakni dari Setyawan dan Darlis (2013, hlm. 6) mengemukakan bahwa terjadinya konflik pada Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia), khususnya Angkatan Darat, pada waktu mereka sedang diperlukan untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan (masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri) yang terjadi pada dekade 1950-an sampai dekade 1960-an tersebut, telah menyebabkan kepercayaan Presiden Soekarno terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia menurun. Dengan demikian, pemerintah mengalihkan pandangannya kepada kekuatan lain, yakni Korps Mobile Brigade.

Bahkan pada kurun waktu itu juga, Korps Mobile Brigade mulai merintis pembentukan Pasukan Ranger. Situs web Korps Brigade Mobil/Brimob mengemukakan bahwa pembentukan Pasukan Ranger tersebut merupakan respons dari Korps Mobile Brigade atas banyaknya apa yang disebut sebagai pemberontakan dan separatisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1950-an tersebut (Korps Brimob, t.t.). Pasukan Ranger mendapatkan pendidikan dan pelatihan di luar negeri untuk mempelajari hal-hal mengenai penyelesaian masalah gangguan keamanan

dalam negeri, yang mana hasil dari pendidikan dan pelatihan tersebut nantinya akan dipelajari dan dijadikan pedoman untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang sedang banyak terjadi di Indonesia pada waktu itu. Setelah terbentuk, mereka juga kemudian dikerahkan dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada kurun waktu tersebut. Moehammad Jasin yang pada dekade 1950-an tersebut menjabat sebagai Panglima Korps Mobile Brigade mengemukakan bahwa dalam sejarahnya pasukan tersebut (Pasukan Ranger) tercatat memiliki prestasi yang gemilang dalam melaksanakan tugas apa yang oleh Jasin disebut sebagai menumpas berbagai gerakan pemberontakan dan pengacau keamanan di seluruh Indonesia (Jasin, 2010, hlm. 185).

Hal tersebut menjadi persoalan menarik, karena menurut kutipan dari pernyataan Sundhaussen yang telah dituliskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, kepolisian disebutkan tidak mampu menangani masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Namun, kemudian terdapat pernyataan lain yang justru menyatakan bahwasannya Korps Mobile Brigade, yang merupakan satuan kepolisian tersebut, turut melakukan tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut, salah satunya dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Bahkan, Korps Mobile Brigade sampai membentuk sebuah pasukan khusus (Pasukan Ranger) untuk menanggapi permasalahan tersebut dan dinyatakan mampu mengatasinya. Pasukan Ranger tersebut juga dikerahkan dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Akan tetapi, keterlibatan dari Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut selama ini seringkali belum banyak diketahui, karena belum banyak dituliskan.

Selama ini, sejarah mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali mengenai peranannya dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia masih belum banyak diketahui jika dibandingkan, salah satunya dengan peranan Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Awaloedin Djamin

bahwasannya sejarah kepolisian sering disebut sebagai blind eye of history, karena masih sedikit sekali buku yang menuliskan mengenai sejarah kepolisian, berbeda dengan sejarah militer. Oleh karena itu, peran kepolisian tidak banyak diketahui dan hampir-hampir luput dari ingatan masyarakat (Djamin, 2007, hlm. 1).

Berangkat dari persoalan tersebut, maka topik mengenai peranan-peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia, seperti dalam peristiwa mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan di Indonesia yang terjadi pada dekade 1950-an menarik untuk diteliti. Namun, penelitian ini akan membatasinya hanya dalam bagaimana andil Korps Mobile Brigade, sebagai salah satu satuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat saja, yang mana merupakan salah satu gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji topik tersebut dengan judul “Korps Mobile Brigade dalam Mengatasi Masalah DI/TII Jawa Barat (1950-1962)”.

Alasan pemilihan topik tersebut dengan membatasinya hanya dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat saja adalah karena selama ini persoalan mengenai mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat identik dengan peranan dari Divisi Siliwangi atau misalnya dengan bantuan rakyat Jawa Barat. Sementara itu, andil dari Korps Mobile Brigade seolah tidak ada karena belum banyak dituliskan. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade, sebagai salah satu satuan kepolisian, dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, apakah tugas Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut memiliki kesamaan dengan tugas Divisi Siliwangi yang merupakan satuan tentara atau kah kedua satuan tersebut memiliki tugas masing-masing. Selain itu, dalam rentang waktu dilakukannya tugas untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, Korps Mobile Brigade sedang merintis pembentukan Pasukan Ranger, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Pasukan Ranger tersebut untuk pertama kalinya dilibatkan dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat ini. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui bagaimana hasil

dari pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pasukan tersebut diterapkan dalam upaya mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat.

Penelitian ini memiliki batasan waktu dari 1950 sampai 1962. Hal tersebut karena tahun 1950 merupakan tahun awal dimulainya penyelesaian terhadap masalah DI/TII Jawa Barat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, tahun 1962 merupakan tahun berakhirnya penyelesaian terhadap masalah DI/TII Jawa Barat tersebut yang ditandai oleh ditangkapnya pemimpin DI/TII Jawa Barat, S. M. Kartosoewirjo.

Mengenai penggunaan nama satuan, penelitian ini tidak menggunakan nama Korps Brigade Mobil/Brimob, melainkan Korps Mobile Brigade untuk menyebutkan nama satuan yang dimaksud. Sebenarnya kedua nama tersebut merujuk kepada arti yang sama, yakni satuan elite milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, pada rentang waktu 1950-1961 tersebut, nama Brimob belum digunakan. Dengan demikian, penyebutan nama satuan tersebut dalam penelitian ini akan menggunakan nama Korps Mobile Brigade. Nama Korps Brigade Mobil/Brimob itu sendiri baru digunakan pada 1961, yakni setelah Presiden Soekarno mengubahnya dari nama Korps Mobile Brigade dengan alasan penyesuaian berdasarkan kaidah bahasa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat 1950-1962”. Untuk memfokuskan penelitian, maka penulis menguraikan permasalahan tersebut menjadi beberapa masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat pada dekade 1950-an?
2. Mengapa Korps Mobile Brigade terlibat dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya-upaya Korps Mobile Brigade mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat sejak 1950 sampai 1962?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi keamanan Jawa Barat pada dekade 1950-an
2. Menganalisis alasan Korps Mobile Brigade terlibat dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat sejak 1950 sampai 1962

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah informasi mengenai pihak-pihak yang memiliki andil dalam dalam perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia yang terjadi pada dekade 1950-an, yakni mengenai andil Korps Mobile Brigade (sekarang Korps Brigade Mobil/Brimob) dari Djawatan Kepolisian Negara (sekarang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai salah satu pihak yang turut andil dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, yang mana selama ini belum banyak diketahui jika dibandingkan dengan andil dari pihak lainnya.

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai pendokumentasian sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korps Mobile Brigade dan peranannya dalam sejarah Indonesia
2. Mengembangkan materi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya bagi peserta didik kelas XII.
3. Menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya peranan Korps Mobile Brigade/Brigade Mobil dalam sejarah Indonesia

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi yang memberikan gambaran kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah kerangka utuh skripsi. Sistematika penulisan pada skripsi ini disesuaikan dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I “Pendahuluan”. Bab ini berisikan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis juga mengungkapkan latar belakang penelitian yang dilakukan oleh penulis, di dalamnya menguraikan mengenai masalah yang melatarbelakangi penelitian tersebut dan alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian mengenai andil dari Korps Mobile Brigade (sekarang dikenal sebagai Korps Brigade Mobil/Brimob) sebagai salah satu satuan milik Djawatan Kepolisian Negara (sekarang dikenal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri) dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Selain itu, bab ini juga terdiri dari beberapa subbab lainnya, yakni seperti rumusan masalah, yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang di dalamnya menguraikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang di dalamnya menguraikan manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta struktur organisasi skripsi atau sistematika penulisan skripsi.

Bab II “Kajian Pustaka”. Bab ini akan berisikan konsep-konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini. Kajian pustaka tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam mengkaji penelitian. Konsep-konsep relevan tersebut akan digunakan sebagai alat analisis untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sehingga menambah kejelasan dalam memberikan jawaban-jawabannya.

Bab III “Metode Penelitian”. Bab ini akan menerangkan bagaimana penulis melakukan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Di dalamnya akan dijelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah, sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah berupa studi

Alia Widara Putri, 2021

KORPS MOBILE BRIGADE DALAM MENGATASI MASALAH DI/TII JAWA BARAT (1950-1962)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pustaka terhadap berbagai sumber kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap beberapa dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

Bab IV “Temuan dan Pembahasan”. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat 1950-1962. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis ajukan dalam rumusan masalah dengan didasarkan kepada temuan data dan fakta sejarah dari berbagai sumber sejarah yang digunakan.

Bab V “Simpulan dan Rekomendasi”. Bab ini merupakan bab penutup dalam laporan hasil penelitian ini. Bab ini akan berisikan simpulan penulis dari hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan dituliskan rekomendasi-rekomendasi penulis kepada pembaca atau pun peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan.